



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;

- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.

- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 113

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 113 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025



Perubahan Rencana Kerja

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bandung



2025



Laman Web
perizinan.bandungkab.go.id

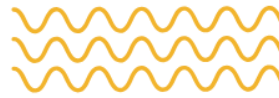


Email
dpmptsp@bandungkab.go.id



Alamat
Jl. Raya Soreang KM 17





KATA PENGANTAR

Bismillah, Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan berkenan-Nya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai upaya optimalisasi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dan juga upaya dalam penyerapan anggaran yang tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan ideal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat ini tentu saja masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, untuk itu sumbang saran untuk kesempurnaannya sangat kami harapkan.

Soreang, Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANANAM MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANDUNG**

H. BEN INDRA AGUSTA, ST., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19690828 199703 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBARv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan7

1.4 Sistematika Penulisan8

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025.....10**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan
Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu10

2.1.1 Capaian Kinerja 10

2.1.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Tercapainya
Target Kinerja Program/Kegiatan.....32

2.1.3 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program
Renstra33

2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
yang perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab
Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan34

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung35

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bandung36

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu37

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...53

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....55

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional55

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja57



3.3. Program dan Kegiatan.....59

3.4. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.....64

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN73

BAB V PENUTUP85

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja.....85

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Renja86

5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 87



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 11

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja 16

Tabel 2.3 Rincian Anggaran DPMPTSP Tahun 2024.....27

Tabel 2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya31

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP58

Tabel 3.2.....60

Tabel 3.3 (TC.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.....65

Tabel 4.1 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja DPMPTSP Tahun 202575



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tren Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan 12

Gambar 2.2 Tren Capaian Nilai Realisasi Investasi 13

Gambar 2.3 Tren Capaian Nilai AKIP DPMPTSP 14

Gambar 2.4 Tren Capaian Persentase BMD dalam Kondisi Baik . 15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagai penjabaran dari dokumen rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bandung disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 5, yang menegaskan bahwa dokumen perencanaan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Renja DPMPTSP memuat informasi mengenai program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, serta pendanaan, yang disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Penyusunannya juga memperhatikan Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Bandung, yang menetapkan kedudukan DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bandung.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, serta dalam rangka optimalisasi dan efisiensi capaian kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2025, maka disusunlah **Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025**. Penyusunan dokumen perubahan ini berpedoman pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 untuk memastikan kesesuaian antara rencana tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah. Selain itu, penyusunan juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja hingga Triwulan I Tahun 2025 sebagai dasar untuk merumuskan kegiatan alternatif

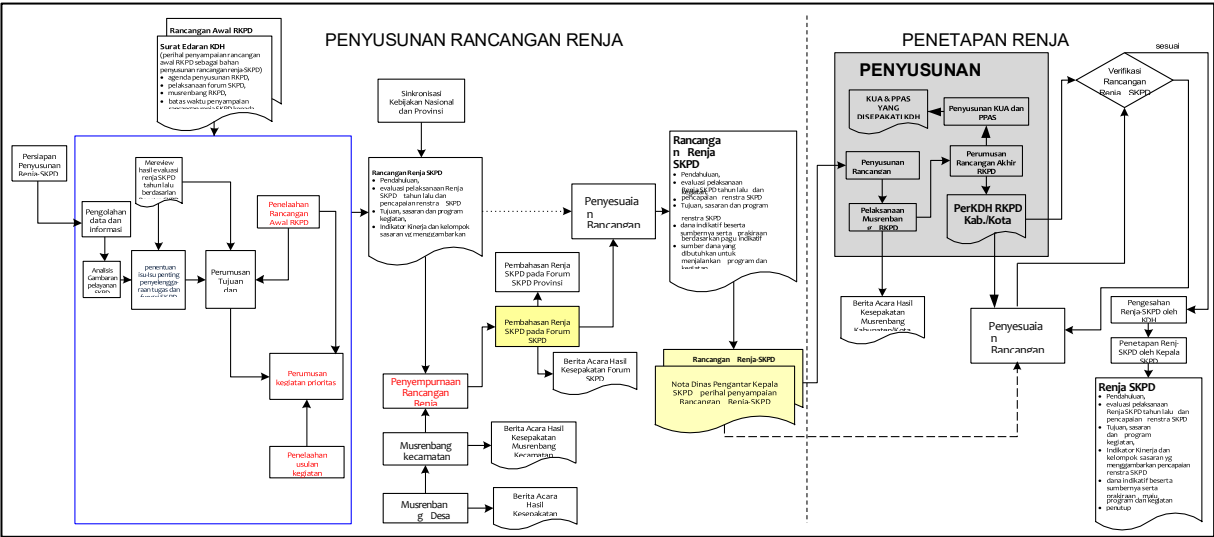


dan/atau kegiatan baru dalam rangka percepatan pencapaian sasaran strategis.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

- 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten



Dengan demikian, Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 merupakan dokumen yang tidak hanya menjabarkan arah pembangunan lima tahunan, tetapi juga menunjukkan integrasi dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 berlandaskan pada dasar hukum dan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten



Bandung tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 98);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 92);



26. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor : 000.8./038/3692/BAPPERIDA tanggal 20 Desember 2024 tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung;
- b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dalam memprogramkan kegiatan Tahunan;
- d) Penyesuaian Pendanaan Program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang efektif, efisien dan tepat guna.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung;
- 2) Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung;



- 3) Mengarahkan pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bandung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu satu Tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung disusun dengan sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi :

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Visi, Misi Perangkat Daerah sesuai Renstra serta proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK baru, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu (Tahun n-2) dan perkiraan



capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan, meliputi :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi Program dan Kegiatan Tahun 2024 serta Permasalahan dan Upaya Penanganan, meliputi :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab ini memuat tentang Rancangan Akhir Rancangan Akhir Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Sasaran RKPD dan capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.

Bab V Penutup

Berisikan Catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum pada Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Di tahun 2024, DPMPTSP Kabupaten Bandung melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.190.909.530,- (setelah perubahan). Hingga Bulan Desember tahun 2024, anggaran yang direncanakan tersebut, terealisasi sebesar Rp. 18.760.110.540, atau sebesar 92,91%.

2.1.1 Capaian Kinerja

Sesuai dengan rencana kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021-2026 telah ditetapkan indikator sasaran yang harus dicapai. Indikator yang ditetapkan sejalan dengan arah kebijakan Kabupaten Bandung yang mengacu pada Misi ke-1 Bupati, yaitu “Membangkitkan Daya Saing Daerah”. Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024, ditetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran yang selaras dengan misi tersebut dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama



tahun berjalan, diantaranya sebagai berikut.

- 1. Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan
- 2. Sasaran kedua Meningkatnya Realisasi Investasi
Indikator: Nilai Realisasi Investasi
- 3. Sasaran ketiga Meningkatkan efektifitas tata kelola Perangkat Daerah DPMPTSP
Indikator: Nilai AKIP DPMPTSP dan Persentase BMD dalam Kondisi baik

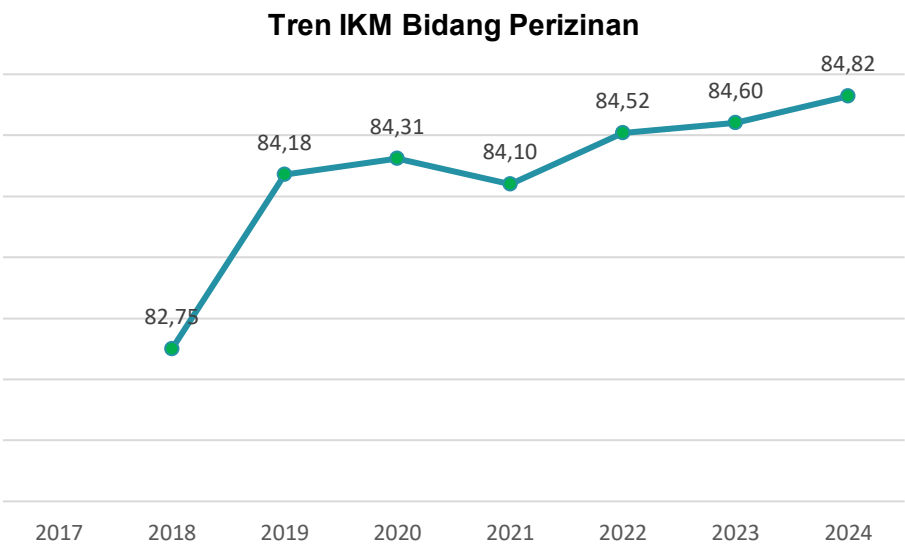
Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung tahun 2024 dibandingkan dengan target yang tercantum pada perubahan perjanjian kinerja tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Poin	84,65	84,82	100,20
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Triliyun Rupiah	30,84	30,99	100,52
3	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Perangkat Daerah DPMPTSP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Poin	81,60	81,60	100,00
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	96,50	98,88	102,47
Rata-rata Capaian						100,80



- 1) Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan dengan Indikator yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan (IKM)** pada tahun 2024 target yang telah ditetapkan untuk Indeks Kepuasan masyarakat yaitu nilai 84,65 Poin dengan predikat mutu pelayanan Baik. Realisasi Nilai IKM pada tahun 2024 **84,82 (Kategori Mutu Baik)**. Berdasarkan hasil capaian kinerja nilai IKM predikat mutu pelayanan Baik artinya realisasi dari target yang telah ditetapkan tercapai dengan persentase capaian sebesar **100,20%**.



Gambar 2.1 Tren Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan

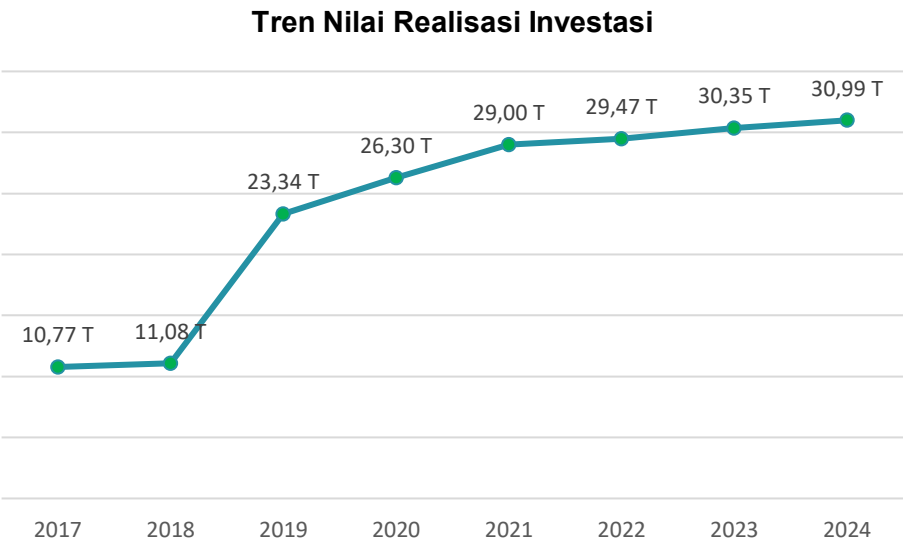
Berdasarkan Gambar 2.3, dapat dilihat bahwa capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan selama periode tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2017, nilai IKM tercatat sebesar 82,77 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai tertinggi sebesar 84,82 pada tahun 2024. Selama delapan tahun terakhir, seluruh capaian nilai IKM berada dalam rentang kategori Baik (B) berdasarkan konversi nilai IKM ke dalam mutu pelayanan, yang berada pada interval 76,61–88,30

- 2) Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi dengan indikator Nilai Realisasi Investasi. **Nilai Realisasi Investasi** pada tahun 2024 sebesar



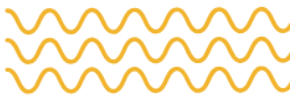
Rp30.999.849.178.398,- dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp30.840.000.000.000,- artinya realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 artinya target kinerja pada tahun 2024 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan persentase capaian kinerja sebesar **100,52%**. Adapun beberapa Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah :

- a. Ketaatan Pelaku usaha dalam melaporkan LKPM online meningkat;
- b. Percepatan mekanisme perizinan melalui sistem aplikasi Perizinan online (SAMIRINDU-PASTI BEDAS);
- c. Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- d. Iklim Investasi di kabupaten Bandung yang semakin kondusif.



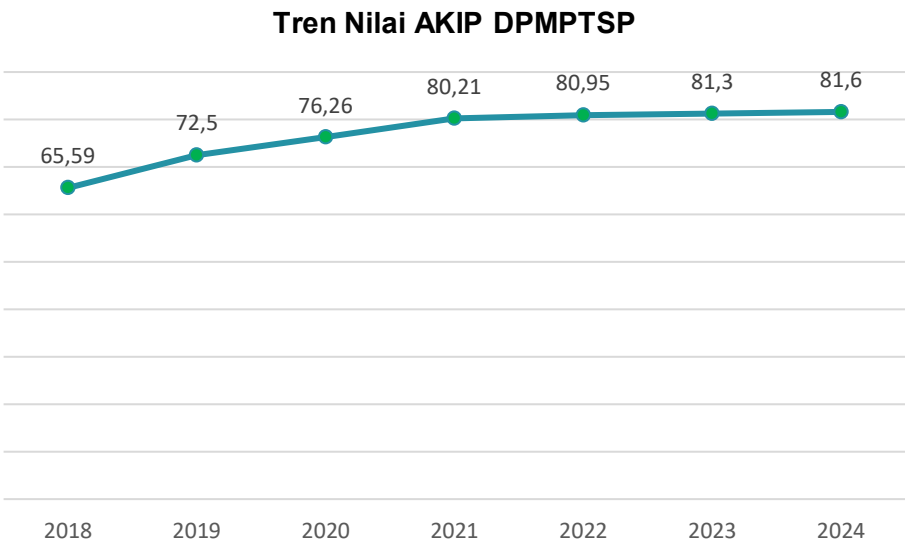
Gambar 2.2 Tren Capaian Nilai Realisasi Investasi

Gambar 2.2 menunjukkan tren capaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Bandung dari tahun 2017 hingga 2024. Secara umum, tren nilai investasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai realisasi tertinggi tercatat



pada tahun 2024 sebesar Rp30.999.849.178.398,00. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendorong iklim investasi yang kondusif serta memperkuat peran strategis sektor investasi dalam pembangunan daerah.

- 3) Sasaran Ketiga Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Perangkat Daerah DPMPTSP dengan dua indikator. Indikator pertama yaitu Nilai AKIP DPMPTSP dan indikator kedua yaitu Persentase BMD dalam Kondisi baik. Pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), target Nilai AKIP tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah 81,60 Poin sedangkan capaian tahun 2024 adalah **81,60**. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar **100%**. Sedangkan Pada indikator kedua Persentase BMD dalam Kondisi baik target yang telah ditetapkan adalah 96,50% BMD dalam Kondisi Baik. Realisasi kinerja sebesar **98,88%** BMD dalam Kondisi Baik. Capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan yaitu **102,47%** dari target yang telah ditetapkan.

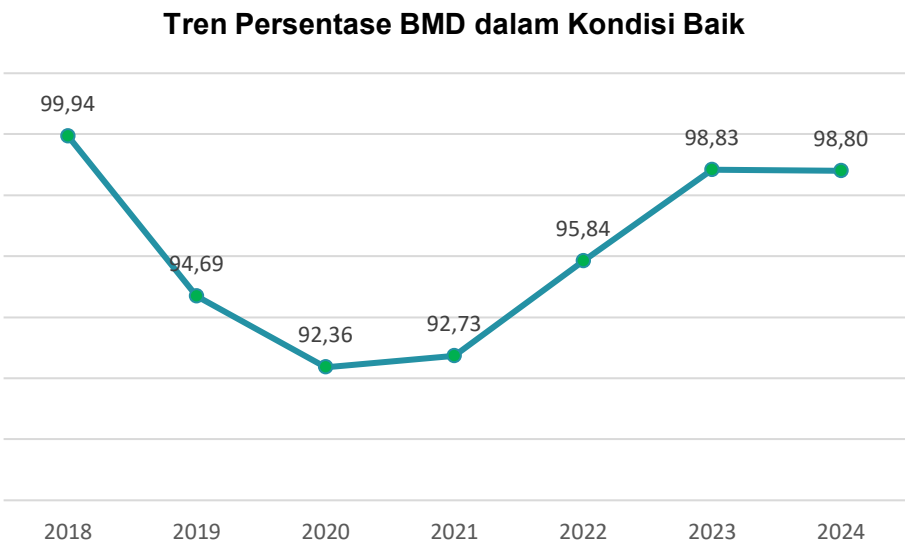


Gambar 2.3 Tren Capaian Nilai AKIP DPMPTSP

Berdasarkan Gambar 2.3, terlihat bahwa tren nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam tujuh tahun terakhir (2018–2024) menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Nilai AKIP berada pada angka 65,59 poin pada tahun 2018, lalu terus mengalami peningkatan hingga mencapai 81,60 poin (kategori A) pada tahun 2024. Secara



keseluruhan, tren nilai AKIP ini menunjukkan bahwa DPMPSTSP secara konsisten melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola kinerja, hingga mampu mencapai kategori “Sangat Baik” dalam evaluasi tahun 2024.



Gambar 2.4 Tren Capaian Persentase BMD dalam Kondisi Baik

Gambar 2.4 menggambarkan tren capaian persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik selama periode 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, persentase BMD dalam kondisi baik berada pada angka yang sangat tinggi, yaitu 99,94%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2019 hingga 2020, dengan persentase menurun masing-masing menjadi 94,69% dan 92,36%.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor usia aset, kurang optimalnya pemeliharaan, atau penambahan aset baru yang belum melalui proses pemeliharaan secara menyeluruh. Namun demikian, tren mulai menunjukkan perbaikan sejak tahun 2021, di mana persentase meningkat menjadi 92,73%, kemudian naik cukup signifikan menjadi 95,84% pada 2022.

Pemulihan kondisi BMD berlanjut hingga tahun 2023 dan 2024, dengan capaian persentase masing-masing sebesar 98,83% dan 98,8%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah, yang mencerminkan komitmen DPMPSTSP Kabupaten Bandung dalam menjaga kualitas dan



keberlanjutan penggunaan aset milik daerah.

Berdasarkan gambaran capaian kinerja indikator yang disajikan, dapat disimpulkan capaian rata-rata kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar **100,80%** dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Diharapkan DPMPTSP Kabupaten Bandung dapat mempertahankan kinerja baik yang sudah berjalan serta menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Ketercapaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) didukung oleh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bandung. Terdapat 6 program, 13 kegiatan, dan 40 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang menunjang langsung terhadap pencapaian kinerja. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator kinerja	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
1.	Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2. Program Promosi Penanaman Modal • Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



2.	Indeks Kepuasan MasyarakatBidang Perizinan (IKM)	1. Program Pelayanan Penanaman Modal • Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal • Pengelolaan Data dan InformasiPerizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota
3.	Nilai Akuntabilitas KinerjaPemerintah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	Persentase BMD dalam kondisi baik	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah

Capaian kinerja untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dievaluasi berdasarkan *outcome* dari masing-masing program sampai *output* dari masing-masing kegiatan dan subkegiatan. Evaluasi ini mengacu pada formulir evaluasi sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 (TC. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP dan Pencapaian Rencana Strategis DPMPTSP s.d Tahun 2021 – 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
	URUSAN PENANAMAN MODAL										
	Bidang Urusan										
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Perentase BMD dalam Kondisi Baik	1. 80,70 Poin 2. 94%	1. 81,30 Poin 2. 98,83%	1. 81,60 Poin 2. 96,50%	1. 81,60 Poin 2. 98,88%	1. 100% 2. 102,47%	1. 81,70 Poin 2. 97%	1. 81,70 Poin 2. 97%	1. 81,60 Point 2. 98,88%	1. 101,12% 2. 105,19%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi	65 Dokumen	26 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen			7 Dokumen	46 Dokumen	70,77%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	9 Dokumen	4 Dokumen	13 Dokumen	86,67%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%	-	-	5 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	-	-	5 Dokumen	50,00%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	3 Dokumen	60,00%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	-	-	5 Dokumen	50,00%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	120,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	-	-	3 Laporan	60,00%
2.18.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	#DIV/0!
2.18.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Data	1 Data	1 Data	#DIV/0!
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang/Bulan	103 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	85,45%	48 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	195 Orang/Bulan	70,91%
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	11 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	21 Dokumen	42,00%
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	-	-	5 Dokumen	50,00%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	70,00%
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Anggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	3 Dokumen	60,00%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	-	-	6 Laporan	60,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	3 Dokumen	60,00%
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	3 Dokumen	60,00%
2.18.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	-	-	4 Laporan	80,00%
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	-	-	3 Laporan	60,00%
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	-	3 Laporan	60,00%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	132 Stel	-	-	-	-	66 Paket	-	-	0,00%
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4 Kali	-	55 Orang	55 Orang	100,00%	55 Orang	-	55 Orang	1375,00%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	-	3 Paket	60,00%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	-	6 Paket	60,00%
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	-	3 Paket	60,00%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.000 Paket	1.200 Paket	600 Paket	600 Paket	100,00%	600 Paket	75 Paket	1.875 Paket	62,50%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	2 Paket	200,00%	1 Paket	-	4 Paket	80,00%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	3 Dokumen	60,00%
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10 Laporan	-	-		-	-	10 Laporan	#DIV/0!
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100,00%	50 Laporan	6 Laporan	156 Laporan	62,40%
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20,00%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%		100%	100,00%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	-	3 Laporan	60,00%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	1 Laporan	-	5 Laporan	100,00%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	94,00%	98,83%	96,50%	98,88%	102,47%	97,00%	0,00%	98,88%	105,19%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100,00%	17 Unit	3 Unit	17 Unit	100,00%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100,00%	15 Unit	5 Unit	15 Unit	100,00%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	200,00%	1 Unit	-	2 Unit	200,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										



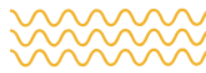
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemitraan pelaku usaha Jumlah peluang investasi unggulan Nilai realisasi investasi Jumlah kemitraan pelaku usaha	33 Kemitraan; 6 Peluang	37 Kemitraan; 3 Peluang	6 Kemitraan; 4 Peluang	12 Kemitraan; 4 Peluang	200%; 100%	7 Kemitraan; 5 Peluang	0 Kemitraan; 0 Peluang	49 Kemitraan; 5 Peluang	148,48%; 83,33%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang Dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%		200%	200,00%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Dokumen	11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	12 Dokumen	240,00%
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 Dokumen	37 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	200,00%	7 Dokumen	-	49 Dokumen	490,00%
2.18.02.2.01.04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	-	-	0,00%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi	100%	20%	20%	25%	125,00%	20%		23%	22,50%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	4 Dokumen	80,00%
2.18.02.2.02.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah melaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	-	-	-	-	1 Daerah	-	-	-
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	4 Dokumen	80,00%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peluang Investasi yang Dipromosikan	100%		20%	100%	500,00%	20%	0%	50%	50,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi	100%	20%	20%	100%	500,00%	20%	0%	40%	40,00%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	-	8 Dokumen	80,00%
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	3 Dokumen	60,00%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	0,40%	0,30%	0,20%	0,26%	129,95%	0,25%	0,00%	0,26%	65,00%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM bidang Perizinan	83,70 Poin	84,60 Poin	84,65 Poin	84,82 Poin	100,20%	87,70 Poin	- ,00	56,47 Poin	67,47%
2.18.04.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	55 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	-	60 Dokumen	240,00%
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25.000 Pelaku Usaha	10.593 Pelaku Usaha	5.000 Pelaku Usaha	5.824 Pelaku Usaha	116,48%	5.000 Pelaku Usaha	1.324 Pelaku Usaha	17.741 Pelaku Usaha	70,96%
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 Orang	5.858 Orang	2.000 Pelaku Usaha	3.302 Pelaku Usaha	165,10%	2.000 Pelaku Usaha	2.097 Pelaku Usaha	11.257 Pelaku Usaha	112,57%
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	600 Kegiatan Usaha	6.515 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	184 Kegiatan Usaha	153,33%	120 Kegiatan Usaha	27 Kegiatan Usaha	6.726 Kegiatan Usaha	1121,00%



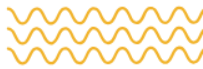
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha									
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha	19%	41,49%	15%	30,51%	203,40%	17,00%		30,51%	160,58%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan PMA/ PMDN yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	535 Perusahaan	1.007 Perusahaan	593 Perusahaan	770 Perusahaan	129,85%	140 Perusahaan	-	1.777 Perusahaan	332,15%
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	250 Kegiatan Usaha	178 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	300,00%	50 Kegiatan Usaha	-	328 Kegiatan Usaha	131,20%
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha	430 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	666 Pelaku Usaha	666,00%	50 Pelaku Usaha	-	1.096 Pelaku Usaha	219,20%
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	250 Kegiatan Usaha	277 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	82 Kegiatan Usaha	164,00%	50 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	360 Kegiatan Usaha	144,00%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	300%	300,00%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal	358 Layanan	358 Layanan	358 Layanan	344 Layanan	96,09%	358 Layanan	344 Layanan	344 Layanan	96,09%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	4 Dokumen	80,00%

Keterangan:

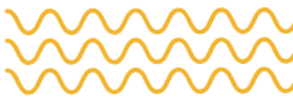
Tabel TC – 29 diatas telah mengalami penambahan berupa kolom Target Kinerja Capaian Program PD Renstra Tahun (2021-2026) sebelum perubahan dan kolom target serta realisasi tahun 2025 untuk membandingkan capaian kinerja tahun 2024 s.d. Semester I Tahun 2025. Selain itu, pada Tahun 2025 DPMPSTP mengalami perubahan nomenklatur subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah., sehingga DPMPSTP perlu menyesuaikan target kinerja capaian program pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



Sebagai perbandingan dengan target yang tercantum dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026, berikut ini merupakan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bandung pada tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 2.2 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Bandung Berdasarkan Target Renstra

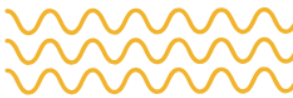
NO	INDIKATOR SASARAN	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN RENSTRA PADA TAHUN KE-					REALISASI TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Nilai IKM Bidang Perizinan			83,60	84,56	84,65	83,75	83,90	84,52	84,60	84,82	83,75	83,90	
2.	Nilai Realisasi Investasi			27,8 T	28,7 T	29,2 T	30,1 T	30,9 T	29,5 T	30,3 T	30,99 T	30,1 T	30,9 T	
3.	Nilai AKIP DPMPTSP			80,50	80,55	80,60	80,65	80,70	80,95	81,30	81,60	80,65	80,70	
4.	Presentase Aset dalam Kondisi Baik			92,45	92,50	92,55	92,60	92,65	95,84	98,83	98,88	92,60	92,65	



Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan total anggaran setelah perubahan pada tahun 2024 sebesar Rp20.190.909.530,00. Rincian anggaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Rincian Anggaran DPMPTSP Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.290.772.710	15.980.231.940	92,42%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.639.100	15.057.700	96,28%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.639.100	3.628.800	99,72%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.934.800	96,74%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	1.779.200	88,96%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	999.800	99,98%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	999.600	99,96%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.915.900	95,80%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	3.799.600	94,99%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.404.833.525	10.438.511.353	91,53%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.390.623.525	10.424.322.353	91,52%
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000	3.999.600	99,99%
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000	2.980.000	99,33%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.210.000	5.209.600	99,99%
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000	1.999.800	99,99%
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.200.000	2.231.000	69,72%
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000	689.400	57,45%
2.18.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	#DIV/0!



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	980.000	98,00%
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	561.600	56,16%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	45.532.000	91,06%
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	45.532.000	91,06%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.704.960	688.164.080	99,63%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.951.500	99,81%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.939.100	273.479.400	99,83%
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.636.200	50.621.350	99,97%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.500.000	85.444.600	99,94%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178.076.000	177.101.500	99,45%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	7.900.000	98,75%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.553.660	68.665.730	98,72%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.017.362.325	3.703.375.425	92,18%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.075.000.000	763.786.520	71,05%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.942.362.325	2.939.588.905	99,91%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.032.800	1.087.360.382	98,05%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.849.800	39.144.142	66,52%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.200.000	238.889.910	99,87%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	810.983.000	809.326.330	99,80%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.447.465.388,00	1.430.067.219,00	98,80%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	77.963.900,00	77.768.397,00	98,63%



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	77.963.900,00	77.768.397,00	99,75%
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1.105.127.625,00	1.089.098.184,00	98,55%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	264.373.863	263.200.638	99,56%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	53.160.283,00	52.970.000,00	99,64%
2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	211.213.580,00	210.230.638,00	99,53%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	206.671.450,00	196.924.433,00	95,28%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	206.671.450,00	196.924.433,00	95,28%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	144.533.150,00	135.109.983,00	93,48%
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	62.138.300,00	61.814.450,00	99,48%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	195.486.488,00	189.186.100,00	96,78%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	195.486.488,00	189.186.100,00	96,78%
2.18.04.2.01.05	Koordinasi dan sinkronsasi penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	60.467.350,00	60.148.000,00	99,47%
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	92.089.238,00	87.088.100,00	94,57%
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	31.803.700,00	31.130.000,00	97,88%
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	11.126.200,00	10.820.000,00	97,25%



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	982.126.994	895.372.358	91,17%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	982.126.994	895.372.358	91,17%
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	178.458.639,00	175.457.198,00	98,32%
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	470.571.115,00	462.191.160,00	98,22%
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	333.097.240,00	257.724.000,00	77,37%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	68.386.500,00	68.328.490,00	99,92%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.386.500,00	68.328.490,00	99,92%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	68.386.500,00	68.328.490,00	99,92%
	Total	20.190.909.530,00	18.760.110.540,00	92,91%

Anggaran yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Bandung pada tahun 2024 terserap sebesar 92,91%. Penggunaan sumber daya dalam mencapai ketercapaian kinerja dinyatakan sudah efisien. Hal tersebut diukur berdasarkan analisis efisiensi, yaitu dengan membandingkan output dan input, baik pada tahap perencanaan maupun realisasi. Efisiensi tercapai ketika realisasi input per unit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Hasil analisis disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	100,20%	97,59%	2,41%
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	100,52%	95,68%	4,32%
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Perangkat Daerah DPMPTSP	Nilai akuntabilitas kinerja instansi DPMPTSP	100%	92,04%	7,96%
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Perangkat Daerah DPMPTSP	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	106,75%	97,96%	2,04%

Selain didukung dengan anggaran, pencapaian kinerja juga didukung oleh sumber daya manusia. Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 terdiri dari 45 Orang Pegawai ASN dan 14 Tenaga Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama

- Islam : 44 Orang
- Protestan : 1 Orang

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki : 25 Orang
- Perempuan : 20 Orang

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

- Eselon II.b : 1 Orang
- Eselon III.a : 1 Orang

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

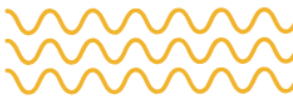
- Sruktural : 3 Orang
- Fungsional Tertentu : 13 Orang
- Fungsional Umum : 29 Orang

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

- Golongan II : 15 Orang
- Golongan III : 26 Orang
- Golongan IV : 4 Orang

6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

- Pasca Sarjana : 6 Orang



Sarjana	: 22 Orang
Diploma IV	: 1 Orang
Dipolma III	: 7 Orang
SLTA Kejuruan	: 1 Orang
SLTA Umum	: 8 Orang

2.1.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

A. Faktor Penghambat

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya:

1. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur perizinan melalui aplikasi SAMIRINDU dan OSS;
2. Belum ada regulasi untuk permintaan informasi dari kecamatan kepada DPMPTSP mengenai data rekap masyarakat yang telah memiliki NIB atau PBG;
3. Respons admin pengaduan belum optimal akibat tingginya beban kerja yang tidak hanya terkait dengan pengelolaan pengaduan;
4. Hanya layanan perizinan non berusaha di aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS yang menyediakan Survei Kepuasan Masyarakat. Sementara itu, perizinan berusaha di system OSS-RBA dan PBG di SIMBG tidak dapat diintegrasikan karena masing-masing system dikelola oleh kementerian.

B. Faktor Pendorong

Adapun faktor pendorong terhadap keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya:

1. Adanya Komitmen pimpinan dan ASN DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi



2. Deregulasi kebijakan perizinan melalui penerbitan beberapa peraturan yaitu:
 - a) Perbup. Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup. Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung;
 - b) Perbup Nomor 256 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung;
 - c) Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Perda. Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d) Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Bedas Taliti.
3. Adanya sistem pelayanan jemput bola sehingga pelayanan perizinan lebih inklusif;
4. Aplikasi perizinan seperti OSS dan SAMIRINDU mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan penyelenggaraan Layanan Melalui Aplikasi Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SAMIRINDU) PASTI BEDAS;
5. Upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai perizinan telah secara konsisten dilaksanakan melalui pemanfaatan media sosial;
6. Petugas pelayanan disiplin terhadap jam pelayanan;
7. Berjalannya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal terhadap para pelaku usaha/ pengusaha Penanaman Modal.

2.1.3 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra



Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program Rencana Strategis DPMPSTSP selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengurangi risiko tidak tercapainya target kinerja, diperlukan kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang lebih adaptif dan berbasis hasil. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, guna memastikan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan, agar seluruh kegiatan yang mengalami penyesuaian dapat tetap dilaksanakan secara optimal dalam sisa waktu anggaran yang tersedia.
4. Indikator kinerja program dan kegiatan perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan hasil/output nyata dari aktivitas yang dilaksanakan. Dengan demikian, capaian kinerja dapat lebih terukur dan akurat sebagai dasar evaluasi.



Evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Sampai dengan tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Bandunug Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (DPMPTSP) merupakan perangkat daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non perizinan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas pokok DPMPTSP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan DPMPTSP mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa program sebagai upaya pelaksanaan tugas dan fungsi agar dapat terlaksana secara optimal. Beberapa program tersebut diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;



4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Dan
6. Program Pengelolaan Data Dan System Informasi Penanaman Modal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Dalam konteks penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, terdapat isu-isu penting yang perlu diperhatikan karena hal tersebut akan berkaitan dengan efektivitas dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dalam melayani masyarakat. Isu –isu penting tersebut diantaranya :

1. Disharmoni regulasi ditingkat Pusat dan Daerah;
2. Potensi Peluang investasi yang dipromosikan belum didukung dengan data yang lengkap dan akurat;
3. Adanya refocussing dan perubahan anggaran yang menyebabkan terbatasnya pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi penyerapan anggaran dan proses pencapaian Indikator Kinerja tidak sesuai dengan target waktu yang sudah direncanakan;
4. Keterbatasan kewenangan terhadap optimalisasi pengembangan IT pada DPMPTSP;
5. Kompetensi pegawai yang belum memadai secara merata karena keterbatasan kewenangan DPMPTSP dalam memberikan pengembangan dan pelatihan untuk pegawai;
6. Perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja yang belum sesuai;
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem daring yang belum optimal dikarenakan belum meratanya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi;
8. Koordinasi dengan Dinas Teknis penerbit rekomendasi belum optimal;



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan sebagai bagian dari proses sinkronisasi antara rencana yang telah disusun dengan hasil analisis kebutuhan faktual di perangkat daerah. Proses ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian dan kelayakan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam menjawab isu strategis serta kebutuhan pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hasil review dituangkan dalam bentuk perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil identifikasi kebutuhan aktual, yang mencakup aspek program, kegiatan, dan subkegiatan; indikator dan target capaian; pagu indikatif; serta kebutuhan riil pendanaan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam perbaikan perencanaan tahun berikutnya:



Tabel 2.3 (TC.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Bandung

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				20.969.832.059,00				20.725.670.606,00	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP DPMPTSP	81,70 POIN	17.329.553.059	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP DPMPTSP	81,70 POIN	18.690.558.624	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi		103.657.115	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi		125.803.988	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.500.000	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.220.500	
1.1.3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	38.417.115	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	73.040.000	
1.1.4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	42.240.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	42.043.488	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik	100%	10.299.241.989	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik	100%	11.034.828.043	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	10.275.741.989	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	11.027.036.543	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.250	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.296.500	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.494.750	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik	97%	8.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik	97%	640.000	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	640.000	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik		99.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik		111.660.600	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	49.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	49.500.000	
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	62.160.600	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		947.331.070	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.253.735.352	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	472.331.070	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	947.414.481	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	68.454.200	
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	87.539.900	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.120.800	
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	35.205.971	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.041.822.885	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.862.756.408	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.075.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	841.289.296	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.966.822.885	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.021.467.112	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	97%	1.830.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	97%	2.301.134.233	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	104.898.733	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	286.235.500	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.600.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.910.000.000	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kemitraan Pelaku Usaha Jumlah Peluang Investasi Unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha	100%	1.590.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kemitraan Pelaku Usaha Jumlah Peluang Investasi Unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha	100%	1.079.803.072	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah	100%	640.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah	100%	357.969.004	
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	250.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	109.153.701	
2.1.2	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3 Dokumen	159.978.422	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.3	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Dokumen	140.000.000	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Dokumen	88.836.881	
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi	20%	950.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi	20%	721.834.068	
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	131.949.868	
2.2.2	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	1 Daerah	250.000.000	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	1 Daerah	198.917.888	
2.2.3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	390.966.312	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi	20%	510.279.000	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi	20%	299.707.830	
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi	20%	510.279.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi	20%	299.707.830	
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	310.279.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	219.301.234	
3.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	80.406.596	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	0,25%	830.000.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	0,25%	224.209.649	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM bidang Perizinan	87,70	830.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM bidang Perizinan	87,70	224.209.649	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	230.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	132.573.104	
4.1.2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.000 Pelaku Usaha	200.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.000 Pelaku Usaha	42.441.345	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik	2.000 Pelaku Usaha	200.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik	2.000 Pelaku Usaha	28.880.000	
4.1.4	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	120 Kegiatan Usaha	200.000.000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	120 Kegiatan Usaha	20.315.200	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha	17%	600.000.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha	17%	389.036.269	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	140 Perusahaan	600.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	140 Perusahaan	389.036.269	
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya'	50 Kegiatan Usaha	250.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya'	50 Kegiatan Usaha	148.350.605	
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	100.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	75.535.462	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	250.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	165.150.202	
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi	100%	110.000.000	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi	100%	42.355.162	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal	358 Layanan	110.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal	358 Layanan	42.355.162	



No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	110.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	42.355.162	

Melalui review ini diharapkan terjadi penyelarasan antara perencanaan dan kebutuhan riil, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran, efisien, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu.



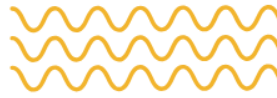
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung tidak dianggarkan untuk kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan namun dikaitkan dengan salah satu Program Prioritas Bupati Bandung yaitu Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga yang diluncurkan melalui kegiatan BUNGA DESA dan REMBUG BEDAS, dengan target ketercapaian ekonomi bagi Masyarakat, yang mana mempersyaratkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), sehingga kami masuk ke dalam kegiatan pendampingan NIB kepada Masyarakat Kabupaten Bandung khusus Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

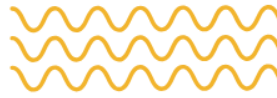
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat ditelaah bahwa program dan kegiatan terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025 dan didasari dengan strategi yang komprehensif, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mempertimbangkan potensi dan tantangan investasi di Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2024 hasil review Rancangan Akhir RKPD pada tabel II.4 (T-C.32) di bawah ini :

Tabel 2.4 (TC.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Rencana Kinerja Tahunan SKPD/PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Berdasarkan hasil kajian evaluasi internal kami, maka ada perubahan/perbaikan untuk tujuan, sasaran dan indikator. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan Dinas, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2025 merupakan penjabaran dari arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dengan fokus pada penguatan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi nasional ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui percepatan layanan perizinan berbasis digital, promosi investasi terintegrasi, serta peningkatan efektivitas fasilitasi dan pengawasan investasi. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM menetapkan target realisasi investasi pada tahun 2025 sebesar **Rp1.868,2 triliun hingga Rp1.905,6 triliun**, atau meningkat sekitar 11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.714,2 triliun. Hingga triwulan I tahun 2025, realisasi investasi nasional tercatat sebesar Rp465,2 triliun atau 24,4% dari target tahunan, menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

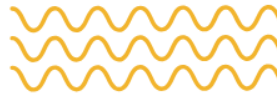
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BKPM menitikberatkan agenda strategisnya pada:

- 1) Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan dan Kemudahan Berusaha

Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya memperkuat tata kelola investasi melalui penyederhanaan perizinan via sistem Online Single Submission (OSS). DPMPTSP Kabupaten Bandung harus memastikan implementasi OSS berjalan optimal dan berinovasi dalam pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

- 2) Peningkatan Kualitas Promosi Investasi yang Berorientasi Pada Sektor-sektor Prioritas Nasional

Arah kebijakan investasi nasional tahun 2025



memprioritaskan beberapa sektor, diantaranya:

- Hilirisasi

Hilirisasi menjadi fokus utama BKPM, dengan target investasi hilirisasi sebesar Rp 1.900 triliun pada tahun 2025. Prioritas ini menuntut DPMPTSP Kabupaten Bandung untuk aktif mendorong investasi yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, khususnya pada sektor-sektor yang relevan dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Bandung.

- Investasi Berkelanjutan (Green Investment) dan Ketahanan Pangan

Kebijakan investasi nasional juga diarahkan pada investasi hijau dan sektor ketahanan pangan. DPMPTSP Kabupaten Bandung diharapkan mempromosikan peluang investasi di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan industri yang ramah lingkungan.

- Teknologi

Sektor teknologi diidentifikasi sebagai primadona investasi asing pada tahun 2025, dengan potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja. DPMPTSP Kabupaten Bandung perlu mengidentifikasi dan menarik investor di bidang teknologi informasi, ekonomi digital, atau industri terkait lainnya yang relevan dengan pengembangan wilayah.

3) Perbaiki mekanisme pelaporan dan pemantauan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

4) Penciptaan lapangan kerja

Selain itu, BKPM juga menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung agenda reformasi perizinan dan fasilitasi investasi yang terkoordinasi dengan baik. Meskipun mengalami keterbatasan pagu anggaran tahun 2025 sebesar



Rp681,8 miliar, jauh di bawah kebutuhan awal sebesar Rp1,57 triliun, BKPM tetap memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan iklim investasi yang sehat, efisien, dan berdaya saing.

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung menjadikan hasil telaahan Renja BKPM 2025 sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan tahun 2025. Fokus DPMPTSP diarahkan pada penguatan integrasi sistem OSS di tingkat daerah, peningkatan mutu pelayanan perizinan, fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal melalui investasi yang difasilitasi, serta pengembangan strategi promosi investasi daerah yang selaras dengan sektor unggulan Kabupaten Bandung. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target nasional, sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah dalam meningkatkan daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Penyusunan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai DPMPTSP Kabupaten Bandung sebagai berikut.

Tujuan	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah Indikator: Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizina dan Investasi Indikator: Nilai Realisasi Investasi

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk mendukung visi Kabupaten Bandung, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung



Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, khususnya pada Misi 2, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.”

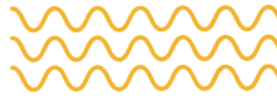
Tujuan yang ditetapkan sejalan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung, sedangkan sasaran yang ditetapkan merupakan *intermediate outcome* yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Bandung, dirumuskan sejumlah indikator yang mencerminkan keterikatan langsung dengan hasil yang ingin dicapai. Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP menetapkan target secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	T1 Terwujudnya peningkatan investasi daerah dan kualitas pelayanan perizinan		T1 Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	7%	7,05%	7,10%	7,15%	7,20%	7,25%	(Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n - Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n-1/Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n-1) x 100
		S1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan investasi	S1.1 Nilai Realisasi investasi	9,61T	10,29T	11,02T	11,81T	12,66T	13,57T	Berdasarkan pelaporan LKPM

Terdapat penyesuaian terhadap metode penetapan target indikator investasi, khususnya terkait dengan sumber data yang digunakan untuk menghitung nilai realisasi investasi daerah. Pada periode sebelumnya, perhitungan nilai investasi menggunakan



gabungan data dari OSS dan LKPM, dengan tujuan mengakomodasi seluruh kanal pelaporan kegiatan usaha yang tersedia. Namun, mulai tahun 2025 dan seterusnya, sumber data utama yang digunakan adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Penyesuaian ini dilakukan untuk:

- Menyelaraskan metode penghitungan dan pelaporan realisasi investasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM, yang telah menetapkan LKPM sebagai sumber data resmi untuk evaluasi kinerja investasi;
- Memastikan konsistensi data lintas level pemerintahan, sehingga hasil pengukuran kinerja DPMPTSP dapat diakui secara vertikal dalam sistem pelaporan nasional;
- Mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM, sekaligus memperkuat sistem pengendalian dan monitoring penanaman modal.

Dengan demikian, seluruh target dan capaian indikator laju pertumbuhan investasi maupun nilai realisasi investasi yang ditetapkan akan merujuk sepenuhnya pada data yang dihimpun melalui sistem LKPM, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, memiliki peran strategis dalam mendorong iklim investasi daerah. Untuk mendukung peran tersebut, pada tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Bandung melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 40 (empat puluh) subkegiatan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.



Tabel 3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	2	3
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Reformasi Birokrasi PD 2. Indeks Manajemen Risiko PD
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.18.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.18.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas



Kode Rekening	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	2	3
	beserta Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan
2.18.01.2.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah



Kode Rekening	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	2	3
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
2.18.02.2.01.03	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi yang Dimanfaatkan
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
2.18.02.2.02.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi
2.18.02.2.02.04	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investasi PMDN dan PMA yang Didorong Melalui Promos Potensi Investasi
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM Bidang Perizinan
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Nilai IKM Bidang Perizinan



Kode Rekening	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	2	3
	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
2.18.04.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang memperoleh layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai bagian dari upaya pemantauan dan penguatan sistem pelayanan satu pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Kinerja PTSP dan PPB

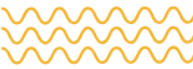


Kode Rekening	Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	2	3
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan untuk Penilaian Kinerja
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan

3.4. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung pada tahun 2025 disusun secara terarah dan terukur, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

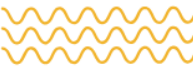
Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi rencana kerja tahun 2025 serta prakiraan arah pelaksanaan pada tahun berikutnya, berikut disajikan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagai berikut.

**Tabel 3.3 (TC.33)**

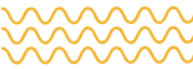
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

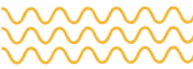
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP DPMPTSP	Nilai AKIP DPMPTSP					81,7 Poin	81,7 Poin	18.474.381.385,12	18.229.909.624,00	(Rp244.471.761,12)			81,75 Poin	17.083.240.184,00	
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persentase BMD dalam Kondisi Baik					97%	97%						97%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi							117.884.128,00	125.803.988,00	Rp7.919.860,00				103.040.000,00	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	9 Dokumen	9 Dokumen	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	7 Dokumen	Rp15.000.000,00	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3 Laporan	3 Laporan	Rp4.000.500,00	Rp3.220.500,00	(Rp780.000,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	7 Laporan	Rp8.000.000,00	
2.18.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp73.040.000,00	Rp73.040.000,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Dokumen	Rp73.040.000,00	
2.18.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Data	1 Data	Rp33.343.628,00	Rp42.043.488,00	Rp8.699.860,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Data	Rp7.000.000,00	



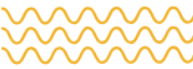
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik	Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik					100%	100%	Rp10.510.796.274,12	Rp11.034.828.043,00	Rp524.031.768,88			100%	Rp10.133.810.000,00	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	Rp10.499.043.774,12	Rp11.027.036.543,00	Rp527.992.768,88	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48 Orang/bulan	Rp10.099.310.000,00	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp5.000.250,00	Rp5.000.250,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	12 Dokumen	Rp22.000.000,00	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Laporan	2 Laporan	Rp3.250.000,00	Rp1.296.500,00	(Rp1.953.500,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	2 Laporan	Rp6.500.000,00	
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp3.502.250,00	Rp1.494.750,00	(Rp2.007.500,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Dokumen	Rp6.000.000,00	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik	Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik					97%	97%	Rp2.780.000,00	Rp640.000,00	(Rp2.140.000,00)			97%	Rp20.000.000,00	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Laporan	1 Laporan	Rp2.780.000,00	Rp640.000,00	(Rp2.140.000,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Laporan	Rp20.000.000,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik					100%	100%	Rp111.660.600,00	Rp111.660.600,00	Rp0,00			100%	Rp106.769.300,00	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	66 Paket	66 Paket	Rp49.500.000,00	Rp49.500.000,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	2 Paket	Rp48.600.000,00	
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	55 Orang	55 Orang	Rp62.160.600,00	Rp62.160.600,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	81 Orang	Rp58.169.300,00	



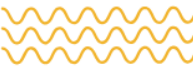
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	100%	Rp860.486.269,00	Rp793.086.352,00	(Rp67.399.917,00)			100%	Rp1.346.487.382,00	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Paket	Rp70.000.000,00	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Paket	2 Paket	Rp480.579.768,00	Rp486.765.481,00	Rp6.185.713,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	2 Paket	Rp762.642.382,00	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	Rp68.454.200,00	Rp68.454.200,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Paket	Rp80.000.000,00	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	600 Paket	600 Paket	Rp51.221.000,00	Rp87.539.900,00	Rp36.318.900,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	2 Paket	Rp125.000.000,00	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	Rp86.440.800,00	Rp50.120.800,00	(Rp36.320.000,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Paket	Rp125.000.000,00	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Laporan	Rp15.000.000,00	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50 Laporan	50 Laporan	Rp58.790.501,00	Rp35.205.971,00	(Rp23.584.530,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	7 Laporan	Rp118.845.000,00	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp50.000.000,00	Rp0,00	(Rp50.000.000,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Dokumen	Rp50.000.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	100%	Rp3.872.012.181,00	Rp3.862.756.408,00	(Rp9.255.773,00)			100%	Rp4.669.133.502,00	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Laporan	1 Laporan	Rp841.289.296,00	Rp841.289.296,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	3 Laporan	Rp900.000.000,00	



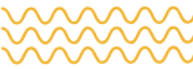
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pegawai Non ASN	Pegawai Non ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Laporan	1 Laporan	Rp3.030.722.885,00	Rp3.021.467.112,00	(Rp9.255.773,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	Rp3.769.133.502,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik					97%	97%	Rp2.998.761.933,00	Rp2.301.134.233,00	(Rp697.627.700,00)			97%	Rp704.000.000,00	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	17 Unit	17 Unit	Rp112.526.433,00	Rp104.898.733,00	(Rp7.627.700,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	10 Unit	Rp200.000.000,00	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	15 Unit	15 Unit	Rp286.235.500,00	Rp286.235.500,00	Rp0,00	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	15 Unit	Rp200.000.000,00	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	ASN	ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3 Unit	3 Unit	Rp2.600.000.000,00	Rp1.910.000.000,00	(Rp690.000.000,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	2 Unit	Rp304.000.000,00	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kemitraan pelaku usaha, persentase harmonisasi regulasi,persentase peluang investasi unggulan	Persentase kemitraan pelaku usaha, persentase harmonisasi regulasi,persentase peluang investasi unggulan					7; 1 Kemitraan; Peluang	7; 1 Kemitraan; Peluang	Rp1.408.173.720,00	Rp1.079.803.072,00	(Rp328.370.648,00)			8 Kemitraan; 1 Peluang	Rp1.418.358.115,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaku usaha yang bermitra	persentase pelaku usaha yang bermitra					100%	100%	Rp562.557.457,00	Rp357.969.004,00	(Rp204.588.453,00)			100%	Rp608.358.115,00	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Masyarakat Pelaku Usaha	Masyarakat Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp219.068.949,00	Rp109.153.701,00	(Rp109.915.248,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	-	Rp198.358.115,00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal														
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp213.254.508,00	Rp159.978.422,00	(Rp53.276.086,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	8 Dokumen	Rp410.000.000,00	
2.18.02.2.01.04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp130.234.000,00	Rp88.836.881,00	(Rp41.397.119,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Dokumen	Rp0,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase peta potensi yang dimanfaatkan	Persentase peta potensi yang dimanfaatkan					20%	20%	Rp845.616.263,00	Rp721.834.068,00	(Rp123.782.195,00)			100%	Rp810.000.000,00	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp165.097.150,00	Rp131.949.868,00	(Rp33.147.282,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Dokumen	Rp550.000.000,00	
2.18.02.2.02.03	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Daerah	1 Daerah	Rp242.352.958,00	Rp198.917.888,00	(Rp43.435.070,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Daerah	Rp60.000.000,00	
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp438.166.155,00	Rp390.966.312,00	(Rp47.199.843,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Dokumen	Rp200.000.000,00	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan	Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan					20%	20%	Rp420.942.800,00	Rp299.707.830,00	(Rp121.234.970,00)			100%	Rp500.000.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi					20%	20%	Rp420.942.800,00	Rp299.707.830,00	(Rp121.234.970,00)			100%	Rp500.000.000,00	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp249.626.200,00	Rp219.301.234,00	(Rp30.324.966,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	2 Dokumen	Rp230.000.000,00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp171.316.600,00	Rp80.406.596,00	(Rp90.910.004,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Dokumen	Rp270.000.000,00	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan					0,25%	0,25%	Rp500.000.000,00	Rp224.209.649,00	(Rp275.790.351,00)			0,40%	Rp700.000.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM bidang Perizinan	Nilai IKM bidang Perizinan					87,7 Poin	87,7 Poin	Rp500.000.000,00	Rp224.209.649,00	(Rp275.790.351,00)			87,75 Poin	Rp700.000.000,00	
2.18.04.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp200.000.000,00	Rp132.573.104,00	(Rp67.426.896,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	1 Dokumen	Rp175.000.000,00	
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	Rp100.000.000,00	Rp42.441.345,00	(Rp57.558.655,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	5000 Pelaku Usaha	Rp150.000.000,00	
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	Rp100.000.000,00	Rp28.880.000,00	(Rp71.120.000,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	3500 Pelaku Usaha	Rp150.000.000,00	
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	Rp100.000.000,00	Rp20.315.200,00	(Rp79.684.800,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	4 Kegiatan Usaha	Rp225.000.000,00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	
		risilko Lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	risilko Lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha														
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha	Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha					17%	17%	Rp480.558.000,00	Rp389.036.269,00	(Rp91.521.731,00)			19%	Rp659.970.701,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)					140 Perusahaa n	140 Perusahaa n	Rp480.558.000,00	Rp389.036.269,00	(Rp91.521.731,00)			140 Perusahaa n	Rp659.970.701,00	
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya'	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya'	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	Rp197.733.000,00	Rp148.350.605,00	(Rp49.382.395,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	50 Kegiatan Usaha	Rp100.000.000,00	
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	Rp81.463.000,00	Rp75.535.462,00	(Rp5.927.538,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	-	Rp179.270.701,00	
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Masyaraka t Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	Rp201.362.000,00	Rp165.150.202,00	(Rp36.211.798,00)	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	55 Kegiatan Usaha	Rp380.700.000,00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi	Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi					100%	100%	Rp55.000.000,00	Rp42.355.162,00	(Rp12.644.838,00)			100%	Rp50.000.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal					358 Layanan	358 Layanan	Rp55.000.000,00	Rp42.355.162,00	(Rp12.644.838,00)			344 Layanan	Rp50.000.000,00	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Masyarakat Pelaku Usaha	Masyarakat Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp55.000.000,00	Rp42.355.162,00	(Rp12.644.838,00)	Penghematan Belanja	Penghematan Belanja	5 Dokumen	Rp50.000.000,00	
TOTAL										21.339.055.905,12	20.265.021.606,00	(Rp1.074.034.299,12)				20.411.569.000,00	



BAB IV

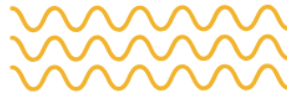
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tahunan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025–2029. Penyusunan ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, serta mengintegrasikan kebijakan nasional, khususnya dari Kementerian Investasi/BKPM.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA SKPD tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Bandung bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024.

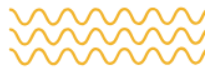
Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, penguatan sistem OSS di daerah, fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, serta pengembangan promosi investasi daerah. Setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, dan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan pagu indikatif maupun proyeksi kebutuhan riil.

Rencana anggaran belanja DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebesar **Rp 20.265.021.606,00** (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Rupiah). Rencana pendanaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung. Kegiatan-kegiatan yang dirancang juga memperhitungkan efektivitas penggunaan anggaran, sinergi lintas sektor, serta potensi



dukungan sumber pendanaan lain yang sah seperti APBN, APBD Jawa Barat. Secara keseluruhan, perencanaan tahun 2025 ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan investasi dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah.

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja DPMPTSP Tahun 2025

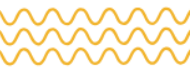
Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP DPMPTSP		81,70 POIN	Rp18.229.909.624
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi			Rp125.803.988
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	Rp7.500.000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	Rp3.220.500
2.18.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp73.040.000
2.18.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	Rp42.043.488



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik		100%	Rp11.034.828.043
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Orang/bulan	Rp11.027.036.543
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp5.000.250
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	Rp1.296.500
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp1.494.750
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik		97%	Rp640.000
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp640.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Baik			Rp111.660.600



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 Paket	Rp49.500.000
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Orang	Rp62.160.600
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp793.086.352
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	Rp50.000.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	Rp486.765.481
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	Rp68.454.200
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Paket	Rp87.539.900
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	Rp50.120.800
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp15.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	Rp35.205.971
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp3.862.756.408
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp841.289.296
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp3.021.467.112
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik		97%	Rp2.301.134.233
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	Rp104.898.733



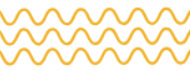
Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp286.235.500
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	Rp1.910.000.000
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kemitraan Pelaku Usaha Jumlah Peluang Investasi Unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha		100%	Rp1.079.803.072
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah		100%	Rp357.969.004
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp109.153.701
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	Rp159.978.422



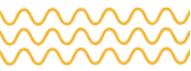
Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.02.2.01.04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp88.836.881
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi		20%	Rp721.834.068
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp131.949.868
2.18.02.2.02.03	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Daerah	Rp198.917.888
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp390.966.312
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peluang Investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi		20%	Rp299.707.830
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi		20%	Rp299.707.830



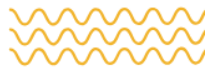
Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	Rp219.301.234
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp80.406.596
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan		0,25%	Rp224.209.649
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM bidang Perizinan		87,70	Rp224.209.649
2.18.04.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	Rp132.573.104
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000 Pelaku Usaha	Rp42.441.345



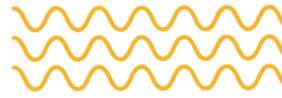
Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000 Pelaku Usaha	Rp28.880.000
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Kegiatan Usaha	Rp20.315.200
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Kepatuhan Penyampaian LKPM Pelaku Usaha		17%	Rp389.036.269
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan PMA / PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		140 Perusahaan	Rp389.036.269
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Kegiatan Usaha	Rp148.350.605



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Pelaku Usaha	Rp75.535.462
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Kegiatan Usaha	Rp165.150.202
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi		100%	Rp42.355.162
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal		358 Layanan	Rp42.355.162



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp68.328.490
Total					Rp20.265.021.606



BAB V

PENUTUP

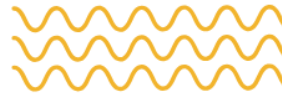
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada bab yang lalu adalah merupakan Rencana Kerja yang dibuat dengan mengoptimalkan capaian kinerja Tahun 2025 dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandung Tahun 2025, dilakukan sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Beberapa catatan penting yang menunjang pelaksanaan Renja tersebut adalah:

1. Tersedianya dukungan dana yang telah sesuai dengan rencana terhadap program dan kegiatan, karena akan berpengaruh pada capaian target kegiatan;



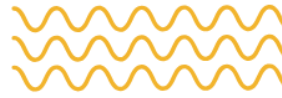
2. Tepat waktu terhadap jadwal kegiatan sehingga diharapkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya sinergitas program kegiatan sesuai dengan rencana awal dalam mencapai tujuan;
4. Adanya kesinambungan capaian kegiatan Tahunan terhadap perencanaan pembangunan terhadap tiap-tiap bidang pada program kegiatan strategis sehingga lebih mempermudah terhadap evaluasi capaian kinerja.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Renja

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan Tahun 2025 didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

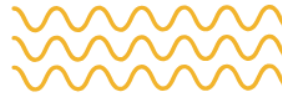


Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja masih belum sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui bimbingan teknis, seminar/workshop, diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis Perangkat Daerah);
6. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;
7. Adanya komitmen pemangku jabatan dan jajarannya termasuk pihak ke-3 terhadap pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu, tepat sasaran dan Akuntabel serta menghindari adanya Kolusi dan KKN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan skala prioritas program pembangunan dalam melaksanakan visi dan misi Kabupaten Bandung, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan target dan



capaian kegiatan tahunan serta proyeksi target dan capaian sampai akhir Renstra Tahun 2025 yang meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan konsultasi rencana kegiatan pameran investasi baik melalui pemerintah pusat (BKPM RI), provinsi dan PD terkait yang ada di Kabupaten Bandung.
- Koordinasi dengan PD terkait untuk validasi data Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), sehingga data peluang investasi yang disusun valid dan akuntabel serta dapat dijadikan panduan berinvestasi di kabupaten Bandung.
- Koordinasi dan Konsultasi kepada instansi pusat yang terkait dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terkait dengan perubahan regulasi dan mekanisme pelayanan perizinan melalui Online Single submission (OSS) sehingga mekanisme dimaksud dapat diaplikasikan di Kabupaten Bandung.
- Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi tingkat Provinsi khususnya kepada DPMPSTSP Provinsi yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bandung dan daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota perbatasan, sehingga adanya sinkronisasi penanganan permasalahan yang ada di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung.
- Mengevaluasi capaian program dan kegiatan serta permasalahannya pada Renja dan Renstra 2025-2029 dengan tindak lanjut pada program/kegiatan untuk skala prioritas Renstra 2025-2029.

**KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG**

TTD

BEN INDRA AGUSTA

Disahkan oleh :
BUPATI BANDUNG

TTD

MOCHAMAD DADANG SUPRIATNA